

PARTISIPASI POLITIK WARGA KAMPUNG MAWOKAUW JAYA DISTRIK WANIA KABUPATEN MIMIKA PADA PEMILU TAHUN 2019

**Jimmy Rungkat¹, Theresia Yunie Puspita², Nely Salu Padang³,
Budiono⁴, Blasius Narwadan⁵**

¹Politeknik Amamapare Timika (jimmyrungkat@gmail.com)

²Politeknik Amamapare Timika (theresia.yuniepuspita@gmail.com)

³STIE Jembatan Bulan (nelysalupadang25@gmail.com)

⁴Komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika (budiono.muchie@gmail.com)

⁵Komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika (narwadanongen@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kuat atau lemahnya partisipasi politik warga kampung Mawokauw Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika pada pelaksanaan Pemilu 2019. Melalui metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dan wawancara mendalam diperoleh hasil bahwa warga kampung Mawokauw Jaya telah memiliki partisipasi politik namun dalam tingkatan paling rendah yakni pemberian suara (voting) pada saat Pemilu dilaksanakan. Di samping itu, masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya karena didasarkan pada tiga faktor penting yakni jarak TPS yang jauh dari tempat domisili, warga yang tidak datang ke TPS karena namanya tidak terdaftar, dan warga tidak menerima undangan. Alasan mendasar dari fakta tersebut karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu sangat minim dan belum dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat RT terkait sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilu atau Pilkada.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Kampung Mawokauw Jaya, Kabupaten Mimika

ABSTRACT

This study aims to measure the strength or weakness of the political participation of the residents of Mawokauw Jaya Village, Wania District, Mimika Regency in the implementation of the 2019 Election. Through a descriptive method with a quantitative approach using questionnaire techniques and in-depth interviews, it was found that the residents of Mawokauw Jaya Village had political participation but at the lowest level namely the voting (voting) at the time of the election held. In addition, there is still a small portion of the public who do not exercise their voting rights because it is based on three important factors namely the distance of the polling station which is far from their domicile, residents who do not come to the polling station because their names are not registered, and residents who do not accept invitations. The basic reason for this fact is because the KPU as the election organizer is very minimal and has not been carried out thoroughly down to the RT level regarding socialization regarding the implementation of the Pemilu or Pilkada.

Keywords: Political Participation, Elections, Mawokauw Jaya Village, Mimika Regency

PENDAHULUAN

Dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi, partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu faktor sangat penting dan bahkan dijunjung tinggi. Dengan adanya efektivitas partisipasi politik masyarakat dapat membuat suatu negara yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tersebut, akan berjalan secara aktif dan konsisten.

Partisipasi politik di sini menunjuk kepada peran aktif setiap warga masyarakat dalam setiap pesta demokrasi yang dilakukan pada Pemilu yang mengerucut pada pelaksanaan Pilpres, Pilkada, maupun Pileg. Tentunya peran aktif yang dimaksud adalah ketika

setiap warga masyarakat dapat mewujudkan keaktifannya dalam memahami serta melibatkan diri secara sadar dan sukarela pada setiap proses tahapan Pemilu tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Herbert McClosky seperti yang dikutip Miriam Budiardjo, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung (2008:367). Lebih tegas lagi, Norman H. Nie dan Sydney Verba dalam *Handbook of Political Science* mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal

untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara (dalam Budiardjo, 1998:2).

Tujuan utama dari partisipasi politik masyarakat ini adalah adanya dorongan dan keyakinan dalam diri warga bahwa melalui keterlibatannya tersebut dapat memberi dampak politik bagi dirinya dalam hal kepentingannya dapat tersalurkan atau dapat diperhatikan dan sekaligus dirinya dapat memberi pengaruh bagi keputusan-keputusan politik ke depannya di dalam negara demokrasi. Untuk itu tinggi-rendahnya partisipasi warga yang terlibat langsung dalam proses demokrasi tersebut akan mempengaruhi kuat atau lemahnya perwujudan sistem ketatanegaraan yang menganut kekuasaan tertinggi negara pada kedaulatan rakyat.

Ketika partisipasi politik masyarakat begitu tinggi pada pelaksanaan Pemilu, maka dengan sendirinya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, legitimasi, kualitas layanan publik, tanggung gugat, dan mencegah gerakan pembangkangan publik dalam perjalanan suatu pemerintahan (Hafidz, 2019:4-5).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Bismar Arianto pada tahun 2011 (dalam Arniti, 2020:331-332) menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat di Indonesia masih relatif rendah, yang mana dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini berupa kendala yang dialami warga seperti sakit, mengikuti kegiatan lain dan hal lain yang bersifat pribadi. Sedangkan faktor eksternal berupa tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapat kartu pemilih, tidak memiliki KTP, kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu, dan ketidakpercayaan kepada partai politik, tokoh politik (politikus), serta kepada realitas politik di Indonesia.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Imam Radianto Anwar Setia Putra, William Socrates dan Purwadi terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 (2020:113) menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat di Papua memiliki tiga karakteristik yakni pemilihan langsung dilakukan oleh warga, pemilihan berdasarkan kesepakatan warga dalam suatu lembaga adat, dan pemilihan yang diwakilkan kepada kepala suku atau yang dikenal sebagai pemilihan sistem Noken. Dalam konteks pemilihan sistem Noken ini, partisipasi politik masyarakat hanya dipandang sebagai formalitas belaka.

Sementara secara spesifik di Kabupaten Mimika, penelitian pernah dilakukan oleh Soter Jangkup (2019) terhadap perilaku pemilih di Distrik Tembagapura dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, yang menemukan bahwa walaupun warga telah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tersebut yang didorong oleh faktor sosiologis, psikologis dan rasional, namun dari tingkat partisipasi aktifnya masih cukup rendah karena mayoritas warga hanya melakukan kegiatan menggunakan hak suaranya di saat hari pencoblosan dan sebelumnya tidak pernah melakukan aktivitas politik lainnya.

Penelitian sejenis namun dilakukan pada lingkup yang lebih kecil juga pernah dilakukan oleh Arwan Magai (2022:10-11) terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Amole di Distrik Kwamki Narama tahun 2019, yang menemukan bahwa partisipasi politik warga juga sangat rendah karena warga hanya menggunakan hak suaranya di hari pemilihan kepala desa tapi tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan politik sebelum hari pemilihan tersebut.

Memang perlu diakui bahwa cukup banyak penelitian yang dilakukan terkait partisipasi masyarakat pada Pemilu di setiap daerah di Indonesia. Namun kuantitas penelitian ini bukan berarti penelitian sejenis di daerah yang berbeda di Indonesia menjadi tidak relevan. Justru dengan semakin banyak penelitian dimaksud akan semakin memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang wajah demokrasi di Indonesia saat ini.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada kampung Mawokauw Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika. Penetapan lokus penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa kampung Mawokauw Jaya telah ditetapkan sebagai kampung sadar pemilih oleh Bawaslu RI pada tahun 2020 (Bawaslu, 2020).

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kuat atau lemahnya partisipasi politik warga Mawokauw Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

KAJIAN TEORI

Kajian teori tentang partisipasi politik sangat luas ditinjau dari berbagai referensi yang ada hingga saat ini. Untuk itu pada pembahasan ini peneliti mendeskripsikan tiga topik utama yakni definisi partisipasi politik,

bentuk-bentuk partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga khususnya pada pelaksanaan Pemilu. Pilihan setiap referensi pada kajian teori ini secara sengaja peneliti tetapkan dalam maksud untuk mempertegas konsep penelitian ini agar tidak abstrak dan tidak absurd serta sekaligus sebagai pijakan indikator-indikator penelitian yang akan dilakukan.

Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba (dalam Bisri, 2013:51) merupakan keterlibatan pribadi warga negara untuk mempengaruhi seleksi para pejabat negara atau keputusan pemerintah. Sedangkan menurut Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 2008:368), partisipasi politik adalah berbagai kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam pemilihan penguasa, serta baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sementara menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (dalam Artini, 2020:333), partisipasi politik adalah kegiatan secara pribadi atau berkelompok dari warga negara yang bermaksud dapat berpengaruh nantinya pada pembuatan keputusan pemerintah.

Secara lebih rinci, partisipasi politik merupakan keterlibatan warga masyarakat yang dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggara dan peserta, mencari tahu karakteristik tentang calon pemimpin, dan memberikan suara pada hari pemungutan (Halim dan Lalongan, 2016:13).

Mengacu pada beberapa definisi di atas, maka partisipasi politik sesungguhnya berada pada dua tataran utama yakni kesadaran dan sikap sukarela warga masyarakat dalam mengikuti berbagai aktivitas politik.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Gabriel A. Almond yang dikutip oleh Melda Imanuela (dalam Hafidz, 2019:325) membedakan partisipasi politik dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik konvensional yang bersifat normal dalam dunia demokrasi modern, dan partisipasi politik non konvensional yang bersifat tindakan tidak

lazim dalam kondisi normal, bahkan dapat berbentuk kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Secara lebih rinci Colin Mc Andrews (dalam Fatwa, 2016:1619) menjelaskan dua bentuk partisipasi politik warga masyarakat, yakni:

1. Partisipasi politik konvensional berupa kegiatan pemberian suara pada saat pemilihan, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
2. Partisipasi politik non konvensional berupa pengajuan petisi, konfrontasi, berdemonstrasi, mogok, tindakan kekerasan politik seperti perusakan, pemboman, pembakaran, serta tindak kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan atau pembunuhan, perang gerilya dan revolusi.

Sementara Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Melda Imanuela (dalam Hafidz, 2019:326) membagi partisipasi politik dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Partisipasi politik apatis: warga masyarakat yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik;
2. Partisipasi politik spectator: warga masyarakat yang setidaknya pernah ikut dalam Pemilu;
3. Partisipasi politik gladiator: warga masyarakat yang secara aktif terlibat dalam proses politik sebagai komunikator, mengadakan tatap muka, aktivis partai, terlibat dalam kampanye politik, dan sebagai aktivis masyarakat;
4. Partisipasi politik pengkritik: warga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

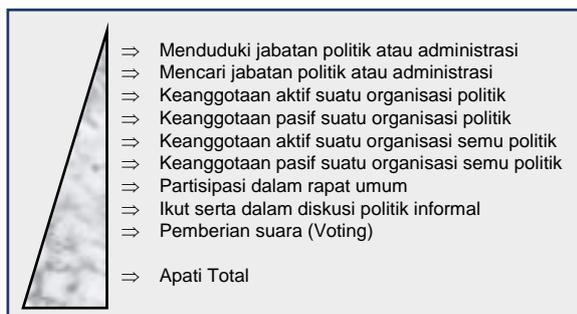
Hal senada namun dalam bentuk yang berbeda juga dipaparkan oleh Affan Gaffar yang dikutip oleh Nila Sastrawati (2019:193-194) terkait partisipasi politik warga masyarakat, yakni:

1. *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Pemilihan Umum, yakni ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, ikut mengambil bagian dalam rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih suatu partai politik atas nama partai itu, memberikan suara

dalam Pemilu, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan, dan sebagainya.

2. *Lobbying*, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun para tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka.
3. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial politik.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan warga masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik baik dilakukan secara individual maupun kelompok dalam jumlah kecil.
5. *Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah biasanya berupa pengrusakan.

Dalam hal ini, Michael Rush dan Philip Althoff (dalam Sastrawati, 2019:192) menyusun bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut dalam hierarki partisipasi politik, di mana hierarki tertinggi adalah menduduki jabatan politik atau administratif, sedangkan hierarki paling rendah adalah apati total (orang yang tidak pernah sama sekali melakukan aktivitas politik) seperti yang tergambar pada gambar berikut ini:



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Warga dalam Pemilu

Partisipasi politik warga pastinya menjadi indikator penting dalam penguatan sistem demokrasi suatu negara, dalam konteks ini khususnya peran aktif warga saat mengikuti Pemilu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayang Indriany Risna Biru terkait partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara menemukan hasil bahwa faktor pendukung partisipasi masyarakat adalah adanya relawan demokrasi dan keluarga yang

menyampaikan sosialisasi serta mendorong untuk mengikuti Pemilu, serta adanya kesadaran dari beberapa warga dalam menggunakan hak suaranya pada saat Pemilu. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah terkait kondisi geografis, adanya permasalahan hak pilih di TPS (atau DPT), serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah (2020:555)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan agar dapat menangkap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan kemudian dikaji lebih mendalam lagi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga kampung Mawokauw Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika dalam Pemilu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni teknik random sampling atau sampel acak, yang mana jumlah sampel berjumlah 215 responden yang tersebar di kampung Mawokauw Jaya Distrik Wania dari 2831 jumlah penduduk yang tercatat. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Sedangkan untuk alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis faktor Konfirmatori dengan bantuan SPSS.

Model umum Analisis Faktor Konfirmatori adalah sebagai berikut:

$$X = \Lambda X\xi + \delta,$$

X = Merupakan vektor bagi peubah-peubah indikator berukuran $q \times 1$

Λ_x = Merupakan matriks bagi faktor loading (λ) atau koefisien yang menunjukkan hubungan X dengan ξ berukuran $q \times n$

ξ = Merupakan vektor bagi peubah-peubah laten berukuran $n \times 1$

δ = Merupakan vektor bagi galat pengukuran berukuran $q \times 1$ ^[4]

Menurut Maiyanti, dkk (2008:16) analisis faktor konfirmatori adalah salah satu metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi model yang dihipotesiskan. Model yang

dihipotesiskan terdiri dari satu atau lebih peubah laten, yang diukur oleh satu atau lebih peubah indikator. Peubah laten adalah peubah yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan peubah indikator untuk mengukurnya, sedangkan peubah indikator adalah peubah yang dapat diukur secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari 215 responden, akan dilakukan analisis Faktor konfirmatori namun sebelumnya perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari isi konstruk setiap item pertanyaan/indikator. Adapun hasilnya pengujian dengan bantuan SPSS sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
1	0,720	0,136	Valid
2	0,735	0,136	Valid
3	0,591	0,136	Valid
4	0,672	0,136	Valid
5	0,733	0,136	Valid
6	0,760	0,136	Valid
7	0,575	0,136	Valid
8	0,625	0,136	Valid
9	0,769	0,136	Valid
10	0,676	0,136	Valid
11	0,760	0,136	Valid
12	0,373	0,136	Valid

Sumber: data diolah, 2022.

Dari 12 pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan semua nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.879	12

Sumber: data diolah, 2022.

Pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke 12 dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,879 > 0,7 yang artinya sejumlah pertanyaan yang dibagikan reliabel.

Berdasarkan pengujian konstruk pada instrument penelitian yakni uji validitas dan reliabilitas didapatkan hasil bahwa instrument penelitian layak untuk digunakan, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap analisis yakni

analisis faktor. Adapaun hasil analisis faktor yang dilakukan sebagai berikut:

a) Uji Kaiser-Meyer - Olkin (KMO)

Hasil analisis data uji *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.887
	Approx. Chi-Square	1130.579
Bartlett's Test of Sphericity	Df	66
	Sig.	.000

Sumber: data diolah, 2022.

Jika nilai KMO MSA lebih besar dari 0,50 maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,887 > 0,50 dan nilai *Bartlett's Test of Sphericity* (Sig) sebesar 0,000 < 0,05 maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan yaitu saling memiliki korelasi antar variabel.

b) *Measure of Sampling Adequacy* (MSA)

Faktor yang layak digunakan dalam analisis adalah faktor yang memiliki nilai MSA > 0,50. Apabila terdapat faktor yang memiliki nilai MSA < 0,50, maka faktor tersebut dikeluarkan agar dapat dilakukan analisis faktor.

Tabel 2. Communalities

	Initial	Extraction
P_1	1.000	.529
P_2	1.000	.591
P_3	1.000	.370
P_4	1.000	.519
P_5	1.000	.608
P_6	1.000	.664
P_7	1.000	.550
P_8	1.000	.424
P_9	1.000	.612
P_10	1.000	.590
P_11	1.000	.597
P_12	1.000	.734

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Jika nilai extraction > 0,5, maka dianggap mampu menjelaskan faktor. Dari nilai extraction diperoleh pertanyaan indikator ke –

3 dan ke – 8 dianggap tidak mampu menjelaskan faktor atau variabel yang di teliti.

Tabel 3. Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5.592	46.602	46.602	5.592	46.602	46.602
2	1.195	9.961	56.563	1.195	9.961	56.563
3	.891	7.428	63.992			
4	.698	5.815	69.807			
5	.681	5.675	75.482			
6	.632	5.265	80.748			
7	.537	4.471	85.219			
8	.469	3.909	89.128			
9	.423	3.526	92.654			
10	.374	3.117	95.771			
11	.290	2.420	98.191			
12	.217	1.809	100.000			

Dari hasil output, maka ada 2 faktor yang terbentuk dari 12 indikator pertanyaan yang dianalisis. Dimana syarat untuk menjadi sebuah faktor, nilai Eigenvalue harus >1. Nilai eigenvalues component 1 sebesar 5,59 > 1, maka menjadi faktor 1 dan mampu menjelaskan 46,60%. Sedangkan nilai Eigenvalue component 2 sebesar 1,195 atau > 1, maka menjadi faktor 2 dan mampu menjelaskan 9,96 %. Jadi Faktor 1 dan faktor 2 jika dijumlahkan maka mampu menjelaskan 56,56 % variasi.

Tabel 4. Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
P_1	.649	.328
P_2	.749	.172
P_3	.582	.177
P_4	.715	.094
P_5	.761	.168
P_6	.805	.130
P_7	.733	-.114
P_8	.570	.314
P_9	.650	.435
P_10	.411	.649
P_11	.624	.455
P_12	-.098	.851

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Dari hasil tabel Rotated Component Matrix^a terdapat pertanyaan indikator ke-6 dan ke-12 merupakan indikator faktor yang dominan.

Tabel 5. Component Transformation Matrix

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	.919	.393
2	-.393	.919

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Karena component transformation matriks menunjukkan bahwa pada component 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,919 > 0,5, dan component 2 nilai korelasinya sebesar 0,919 > 0,5, maka kedua faktor component yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak merangkum ke 12 indikator yang di teliti.

Berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa masyarakat sangat antusias dan berperan aktif dalam mengikuti proses Pemilu atau Pilkada. Namun di tengah-tengah antusiasme tersebut, masyarakat tidak begitu aktif dalam berpartisipasi lewat diskusi di ruang publik seperti memberi pendapatnya di media sosial tentang situasi dan kondisi politik yang terjadi.

Pada saat dilakukan pendalaman melalui wawancara kepada Kepala Kampung dan ketua-ketua RT, ditemukan berbagai variasi jawaban.

Kepala kampung Mawokauw Jaya mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat sangat aktif dengan cara datang ke TPS memberikan hak pilihnya pada saat Pemilu atau Pilkada dilaksanakan. Namun setelah itu, sebagian besar dari mereka langsung pulang, tanpa mengikuti hingga akhir perhitungan suara. Di samping itu, masyarakat juga belum memiliki kesadaran untuk mengajak keluarga atau warga sekelilingnya untuk datang memberi hak suaranya ke TPS. Sebelum itu, masyarakat juga tidak begitu mengetahui visi dan misi dari setiap calon.

Sementara fakta yang ditemukan berdasarkan pengakuan dari ketua-ketua RT bahwa ada sekitar 10 persen lebih masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan tiga faktor utama yakni jarak TPS yang jauh dari tempat domisilinya, warga yang

tidak datang ke TPS karena namanya tidak terdaftar, dan ada juga warga yang tidak menerima undangan. Faktor penting lainnya yang ditemukan bahwa penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah sangat minim melakukan sosialisasi dan jika pun dilakukan sosialisasi, hal tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat RT.

PENUTUP

Melalui penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat di kampung Mawokauw Jaya, ditemukan hasil bahwa warga sudah memiliki partisipasi politik secara aktif namun masih berada pada tingkatan yang palng rendah yakni pemberian suara. Faktor penting terjadinya fakta ini adalah kurangnya dan belum secara menyeluruh sosialisasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu kepada warga tentang partisipasi politik.

REFERENSI

- Artini, Ni Ketut. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4 No. 2, 329-348.
- Bizri, A. Zaini. 2013. "Partisipasi Politik dalam Keterbukaan Informasi Publik", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1, 47-55.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa, Ayuni Nur. 2016. "Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Panajam Paser Utara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 4, 1615-1626.
- Hafidz, Masykurudin, ed. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Halim, Rahmawati dan Lalongan, Muhlin. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik*. Makassar: Sah Media.
- Jangkup, Soter, Rondonuwu, Arpi R., dan Lengkong, Johny. 2019. "Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Studi Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Papua)", *Jurnal Politico*, Vol. 8 No. 1.
- Mayang, Indriany Risna Biru. 2020. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 2, 545-558.
- Sastrawati, Nila. 2019. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19 No. 2, 187-197.
- Setia Putra, Imam Radianto Anwar, Kasimat, William Socrates, dan Purwadi. 2020. "Political Participation of Communities in the 2018 Papua Gubernatorial Election Agenda", *Jurnal Bina Praja*, Vol.12 No. 2, 113-123.

Sumber Internet:

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/resmikan-kampung-sadar-pemilih-fritz-ajak-masyarakat-awasi-pilkada-di-papua>, dipublish tanggal 20 Oktober 2020.